

Guru: Aset Bangsa, Bukan Beban Negara

STATEMEN



Menteri Keuangan Sri Mulyani di video pendek yang seolah mengatakan "guru adalah beban negara" mengusik perhatian publik. Potongan video itu ternyata hasil ma-

nipulasi digital (*deepfake*) yang mereproduksi isi pidato panjang tentang tantangan fiskal pendidikan. Kasus ini menyangkut dua hal. Pertama, betapa berbahayanya manipulasi informasi. Kedua, betapa sensitifnya isu guru.

Guru dan Martabat Bangsa

Bung Karno pernah menegaskan, "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya." Tentara dan pejuang kemerdekaan adalah pahlawan bangsa, sedangkan guru adalah pahlawan peradaban. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga menanamkan nilai dan membentuk karakter anak-anak bangsa.

Masyarakat sering memperlakukan guru sekadar sebagai angka dalam anggaran. Padahal, guru adalah kunci dari pendidikan sebagaimana digagas Ki Hadjar Dewantara, "*Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*." Guru memberi teladan, menumbuhkan semangat dan menuntun anak didik. Dengan demikian, guru adalah aset bangsa, bukan beban negara.

Beban Fiskal atau Investasi?

Dalam pidato yang dipotong, Sri Mulyani sedang mengajak kita berefleksi bagaimana mendanai pendidikan secara berkelanjutan. Gaji dan tunjangan guru sebagian besar ditanggung APBN. Pertanyaannya, apakah hal itu dilihat sebagai beban atau investasi jangka panjang?

Jika pendidikan merupakan jalan menuju Indonesia Emas 2045, maka guru adalah tiang penyangganya. Masalahnya, publik sering menilai anggaran pendidikan hanya dari besarnya angka. Padahal persoalannya lebih kompleks: distribusi guru tidak merata, kualitas pelatihan tidak konsisten, dan birokrasi pengelolaan pendidikan sering menghambat kreativitas guru.

Tantangan di Era Digital

Polemik ini juga menunjukkan betapa dahsyatnya dampak "*deepfake*." Satu

Bernardus Agus Rukiyanto

potongan video bisa merusak reputasi seorang pejabat, sekaligus memantik kemarahan jutaan guru. Literasi digital kita masih rapuh: masyarakat cepat percaya sebelum sempat memeriksa.

Inilah tantangan baru pendidikan nasional. Guru selama ini mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung, kini mereka juga harus membekali anak-anak dengan kemampuan memilah in-

fleksi:

Pertama, komunikasi publik yang jernih: pemerintah harus segera merilis versi lengkap setiap pidato penting di kanal resmi, agar publik tidak mudah terjebak pada potongan hoaks. Kedua, pendidikan tidak bisa sepenuhnya disandarkan pada APBN. Dunia usaha, masyarakat sipil, bahkan komunitas keagamaan perlu ikut terlibat melalui dana abadi, beasiswa, maupun pendampingan moral. Ketiga, penguatan literasi digital: guru perlu diberi bekal untuk menanamkan literasi digital pada generasi muda. Anak-anak harus diajari bagaimana menyaring informasi dan berpikir kritis sebelum percaya.

Dari Beban Menjadi Harapan

Bung Karno pernah berkata, "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Kata-kata ini relevan dengan tantangan pendidikan kita. Musuh kita bukan lagi penjajah asing, melainkan ketidakpedulian, kebodohan, dan manipulasi informasi.

Guru berada di garis depan perjuangan ini. Mereka tidak boleh dipandang sebagai beban negara, melainkan sebagai harapan yang menyelamatkan masa depan bangsa. Tugas kita adalah memastikan para guru mendapatkan penghargaan yang layak.

Untuk mencapai Indonesia Emas pada 2045, guru berperan sebagai cahaya bangsa. Tugas kita untuk menjaga agar cahaya itu tidak pernah padam. (*)-d

*)Bernardus Agus Rukiyanto,
Dosen Universitas Sanata Dharma.



KR-JOKO SANTOSO

formasi, berpikir kritis, dan mengolah emosi di tengah arus media sosial. Pendidikan literasi digital tidak kalah penting dari pendidikan matematika atau sains.

Mengembalikan Narasi

Kita tidak boleh terjebak dalam retorika guru sebagai beban negara. Kita harus mengembalikan narasi bahwa guru adalah aset bangsa. Ki Hadjar Dewantara mengingatkan, pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, melainkan proses pembentukan karakter. Jika demikian, mengapa kita masih sering menomorduakan kesejahteraan guru?

Polemik ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat komitmen negara terhadap guru: bukan sekadar menaikkan gaji, melainkan memperhatikan kualitas hidup guru secara holistik: memberi kesempatan pengembangan diri, mengakses teknologi dan penghargaan yang layak.

Jalan ke Depan

Polemik ini mengundang kita bere-

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa melampirkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

TIGA KALI MANGKIR DIPANGGIL Riza Chalid Masuk DPO Kejagung

JAKARTA (KR) - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan tersangka kasus dugaan korupsi minyak mentah Muhammad Riza Chalid (MRC) sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Penetapan DPO tersebut setelah Riza Chalid mangkir dari panggilan sebagai tersangka oleh penyidik sebanyak 3 kali.

Terdapat MRC, penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidus) telah menetapkan DPO per tanggal 19 Agustus 2025, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspennuk) Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Jumat (22/8). Setelah masuk dalam DPO, sambung Anang, penyidik pada Jampidus kini sedang memproses untuk memasukkan bos minyak tersebut ke dalam daftar Red Notice Interpol. "Saat ini sedang dalam proses untuk red notice, sedang dibicarakan dengan NCB Interpol," ujarnya.

Kejagung juga tengah menggali soal dugaan keterlibatan rekan bisnis Riza Chalid dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan tindak pidana asal dugaan korupsi minyak mentah. Rekan bisnis Riza Chalid tersebut berinisial IP dan telah dipanggil sebagai saksi.

"Yang bersangkutan tiga kali dipanggil (sebagai saksi) tidak hadir dan dari informasi, yang bersangkutan tidak ada di Indonesia," kata Anang.

Dalam kasus TPPU, IP diduga terlibat dalam menyamakan aset Riza Chalid yang telah disita Kejagung, yakni lima unit mobil mewah dan sejumlah uang tunai dari berbagai mata uang.

* Bersambung hal 9 kol 1



Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer saat dihadirkan sebagai tersangka usai terjaring OTT KPK pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Ditetapkan Tersangka dan Ditahan KPK Wamenaker Berharap Dapat Amnesti Presiden

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) atau Noel sebagai salah satu tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya KPK melakukan penahanan terhadap Wamenaker dan 10

tersangka lainnya untuk 20 hari pertama, yakni terhitung 22 Agustus-10 September 2025 di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih.

"KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni sa-

lah satunya IEG," ujar Ketua Setyo Budiyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8).

* Bersambung hal 9 kol 1



Analisis Sekolah Rakyat

Prof Dr Sutrisna Wibawa MPd

SEKOLAH Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan akses pendidikan berkualitas secara gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Indonesia. Program ini dirancang dengan konsep sekolah berasrama (boarding school), yang mencakup jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Tujuan utama program ini adalah pemerataan akses pendidikan untuk memberikan kesempatan belajar yang setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan pemerantasan kemiskinan melalui pendidikan berkualitas.

Pendidikan untuk Semua

Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo ini sejalan dengan Gerakan Pendidikan untuk Semua, yaitu sebuah konsep yang mengemukakan bahwa semua individu, tanpa memandang usia, jenis kelamin, latar belakang sosial,

* Bersambung hal 9 kol 1

JADWAL SALAT	Zuhur	Azar	Magrib	Isya	Subuh
	11:45	15:04	17:41	18:51	04:28

Sabtu, 23 Agustus 2025

PRESIDEN INGIN

RI Jadi 'Killing Ground' Bandar Narkoba

JAKARTA (KR) - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemko Polkam) mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto menginginkan Indonesia menjadi negara penumpas atau killing ground terhadap bandar maupun jaringan narkoba.

"Mengutip arahan Presiden Prabowo yang disampaikan kepada Menko Polkam bahwa Presiden menginginkan Indonesia menjadi killing ground atau tempat penumpasan bagi bandar dan jaringan narkoba," kata Sekretaris Kemko Polkam Letjen TNI Mochamad Hasan di Jakarta, Jumat (22/8).

Dalam menjalankan pesan Presiden itu, Kemko Polkam mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergerak memerangi narkoba. Hasan menyebut ini bukan saatnya untuk berkompromi, melainkan saat yang tepat untuk menyatakan cukup terhadap narkoba.

Ia pun meyakini Indonesia tidak akan dikuasai oleh narkoba. "Kita hadapi mereka dengan hukum, dengan kekuatan dan dengan tekad yang tidak bisa dibeli," katanya.

Hasan menjelaskan, Desk Pemberantasan Narkoba yang dikoordinasi oleh Kemko Polkam telah mengintegrasikan kekuatan seluruh kementerian/lembaga, mulai dari BNN, TNI, Polri, Kejaksaan, Imigrasi, Bea Cukai, BIN, hingga Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

* Bersambung hal 9 kol 5

TERIMA SUAP VONIS BEBAS RONALD TANNUR Eks Ketua PN Surabaya Divonis 7 Tahun

JAKARTA (KR) - Mantan/eks Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono divonis pidana penjara selama 7 tahun setelah terbukti menerima suap atas pengondisian perkara terpidana Ronald Tannur dan menerima gratifikasi selama menjadi ketua PN. Rudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu alternatif kedua dan dakwaan kumulatif kedua jaksa penuntut umum.

Terdakwa terbukti menerima suap senilai 43 ribu dolar Singapura dan gratifikasi berupa uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing sekitar Rp20 miliar," ujar Hakim Ketua Iwan Irawan dalam sidang pembacaan putusan majelis hakim di Pengadilan Tin-



Rudi Suparmono

dak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (22/8). Selain pidana penjara, Rudi turut dikenakan pidana denda sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti (subsidi) dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Dengan demikian, Rudi dinyatakan telah melanggar Pasal 5 ayat (2) dan Pasal

12B juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sebelum menjatuhkan vonis, Hakim Ketua mengungkapkan majelis hakim mempertimbangkan

* Bersambung hal 9 kol 1

Revisi UU Pemilu Mulai Awal 2026

MALANG (KR) - Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, termasuk opsi pemisahan pemilu nasional dan daerah serta usulan pemilihan kepala daerah dipilih DPRD dimulai digulirkan awal 2026. Dibukanya masa pembahasan revisi UU tersebut pada tahun depan, karena saat ini pihaknya masih membahas beberapa undang-undang lain.

"Soal pembahasan revisi paket politik tentang UU Pemilu itu insya Allah baru dimulai pada awal 2026," kata Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin di Kota Malang Jawa Timur, Jumat (22/8).

Meski demikian, Khozin menyatakan, hingga saat ini Komisi II DPR RI sudah mulai melakukan beberapa tahapan untuk mempersiapkan pembahasan perubahan Undang-Undang Pemilu. "Yang pasti 2026 sudah mulai running, kalau saat ini sebenarnya sudah mulai tahapan, seperti rapat dengar pendapat dan forum group discussion soal kepemilikan," ucapnya.

Ia menyampaikan, telah melakukan penguatan kelembagaan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, pihaknya juga melakukan penguatan kelembagaan Bawaslu di Madura. "Artinya, proses sudah jalan, tetapi officialnya insya Allah 2026," ucapnya.

Selain itu, Khozin menyebut usulan kepala daerah, yakni bupati, walikota dan gubernur yang dipilih oleh DPRD tetap sesuai dengan demokrasi. "Kita menengali istilah demokrasi bisa direct dan indirect, keduanya itu sama-sama demokrasi."

* Bersambung hal 9 kol 4

DIPERIKSA KPK SOAL IKLAN BJB

Lisa Mariana Bakal Kooperatif

JAKARTA (KR) - Selegram Lisa Mariana Presley Zulkandar (LM) tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Jumat (22/8) pukul 11.25 WIB. Lisa mengaku telah membawa sejumlah berkas untuk pemeriksaan kasus tersebut.

"Saya bakal kooperatif menjelaskan sedetail-detailnya. Ya, berkas ada," ujar Lisa yang mendatangi KPK untuk menjadi saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021-2023.

Sebelumnya, Lisa Mariana dalam cerita yang diunggah-nya melalui akun Instagram pribadinya, @lisemarianaas mengungkapkan penanganannya tersebut. "Tanggal 22 (Agustus 2025, red.) saya dipanggil ke KPK untuk menjadi saksi. Saya juga bingung

KPK bermitra," katanya. PK merespon jadwal panggilan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) setelah sele-

gram Lisa Mariana menghadiri panggilan lembaga antirasuah tersebut. "Nanti jika sudah ada jadwal pemanggilannya, tentu nanti

akan kami sampaikan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

* Bersambung hal 9 kol 5



Selegram Lisa Mariana Presley Zulkandar berbincang dengan kuasa hukum sebelum menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

SUNGGUH SUNGGUH TERJADI

● SAYA sering cek apakah siswa bawa buku paket atau tidak. Siswa yang tidak membawa buku paket, saya beri 'hukuman' membaca KR yang ditempel di dekat perpustakaan, lalu saya minta menceritakan yang sudah dibacanya. Suatu hari saya bertanya, "Siapa yang sudah belajar semalam?" Satu siswa tunjuk jari dan menjawab lantang, "Saya sudah belajar, Bu!" Ketika saya tanya lagi pengalamannya, dia menjawab, "Belajar dari pengalamannya, Bu. Kemarin ngak bawa buku paket, sekahar bawa." (Dra Ayu DW, Jalan Tinalan 462B Kota gede Yogyakarta 55172)

TAJUK RENCANA OTT Wamenaker

KASUS penangkapan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer yang biasa dipanggil Noel, Rabu malam lalu, tentu merupakan tamparan keras bagi Presiden Prabowo. Menurut Wakil Ketua KPK Fitroh Rohaehyanto, OTT tersebut terkait pengurusan sertifikat K3.

Di tengah gencarnya Prabowo memerintahkan penindakan terhadap pelaku korupsi, justru menteri sendiri yang terkena OTT. Terusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Tentu saja kasus tersebut dengan cepat mencuat, bahkan berubah menjadi bola liar, dengan berbagai tanggapan. Kasus tersebut juga menjadi 'umpas empuk' bagi pihak-pihak yang selama ini menjadi lawan-lawan politik Prabowo. Ada pula yang menilai, ibarat permainan sepakbola, Noel melakukan blunder dan melakukan gol bunuh diri. Di jadikan senjata oleh pihak-pihak yang akhir-akhir ini ngogrok-ngrok Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penggantian sejumlah menteri.

Dalam dunia wayang, juga ada sejumlah lakon dan banyak tokoh yang bermunculan seperti kondisi negeri kita saat ini. Di antaranya dalam lakon Parikesit Ratu, yakni saat Prabu Parikesit bertahat sebagai raja Astina, muncul tokoh seperti Begawan Curigana. Dalam lakon tersebut diceritakan bahwa perang besar Baratayuda sudah selesai. Negeri Astina yang dipimpin Prabu Parikesit dalam kondisi aman dan tenteram, mendadak didanda hura hura setelah Kertiwinda (cucu Sengkuni) menghasut Panakusuma (cucu Yudistira).

Di tengah hura hura tersebut, muncullah sosok Begawan Curigana sebagai reinkarnasi Prabu Baratayuda yang semesta perang besar Baratayuda diasingkan oleh Batara Kresna ke Pertapaan Takiranda. Bersamaan kemunculan Begawan Curigana di Negeri Astina, juga muncul arwah para tokoh dari Kurawa, seperti Gendari dan Sengkuni. Arwah mereka memasuki beberapa sosok, untuk balas dendam atas kekalahan Kurawa dalam Baratayuda.

Akanlah kasus Immanuel Ebenezer juga akan memunculkan sosok-sosok Gendari dan Sengkuni dan Kertiwinda? Terkait OTT Noel, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo masih menunggu hasil resmi proses hukum di KPK. Jika terbukti melakukan pelanggaran hukum, Noel akan diproses dan diberi tindakan tegas maupun langkah administrasi.

Mengenal kemungkinan penggantian posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Prasetyo Hadi menyatakan penggantian pejabat negara memiliki aturan mekanisme tersendiri. Memang, ada kemungkinan kemudian terjadi penggantian menteri atau reshuffle kabinet.

Hari-hari ini sampai beberapa hari ke depan, kita tunggu saja bagaimana akhir dari lakon Immanuel Ebenezer. Apakah ia akan tetap menunjukkan satu jempol tangan, dua jempol atau berubah jadi kelinking? Ini memang kasus pertama menteri Prabowo terkena OTT. Tapi, apakah negeri ini memang sedang terus diuji?

Apakah kasus tersebut sekadar uji nyali? Yang pasti, kasus Immanuel Ebenezer harus dijadikan pelajaran bagi para pejabat negara, khususnya setingkat menteri, agar lebih hati-hati. Bekerja dengan hati, bukan dengan omongan ngawur. □

Guru: Aset Bangsa, Bukan Beban Negara



STATEMEN

Menteri Keuangan

Sri Mulyani di video

pendek yang seolah

mengatakan "guru

adalah beban negara

" mengutip perbantuan publik.

Potongan video itu ternyata hasil manipulasi digital (deepfake) yang mereduksi isi pidato panjang tentang tantangan fisik pendidikan. Kasus ini menyangkut dua hal. Pertama, betapa berbahaya manipulasi informasi. Kedua, betapa sensitifnya isi guru.

Guru dan Martabat Bangsa. Bung Karno pernah mengatakan, "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya." Tentara dan pejuang kemerdekaan adalah pahlawan bangsa, sedangkan guru adalah pahlawan peradaban. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga menanamkan nilai dan membentuk karakter anak-anak bangsa.

Masyarakat sering memperkirakan guru sekadar sebagai angka dalam anggaran. Padahal, guru adalah kunci dari pendidikan sebagaimana digagas Ki Hadjar Dewantara, "Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani." Guru memberi teladan, menumbuhkan semangat dan menuntun anak didik. Dengan demikian, guru adalah aset bangsa, bukan beban negara.

Beban Fiskal atau Investasi?

Dalam pidato yang dipotong, Sri Mulyani sedang mengajuk ke arah ini bagaimana mendanai pendidikan secara berkelanjutan. Gaji dan tunjangan guru sebagian besar ditanggung APBN. Pertanyaannya, apakah hal itu dilihat sebagai beban atau investasi jangka panjang?

Jika pendidikan merupakan jalan menuju Indonesia Emas 2045, maka guru adalah tiang penyanggannya. Masalahnya, publik sering menilai anggaran pendidikan hanya dari besarnya angka. Padahal persoalan yang lebih kompleks: distribusi guru tidak merata, kualitas pelatihan tidak konsisten, dan birokrasi pengelolaan pendidikan sering menghambat kreativitas guru.

Tantangan di Era Digital

Polemik ini juga menunjukkan betapa dahsyatnya dampak "deepfake." Satu

Bernardus Agus Rukiyanto

potongan video bisa merusak reputasi seorang pejabat, sekaligus memantik kemarahan jutaan guru. Literasi digital kita masih rapuh: masyarakat cepat percaya sebelum sempat memeriksa.

Inilah tantangan baru pendidikan nasional. Guru selama ini mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung, kini mereka juga harus membekali anak-anak dengan kemampuan memilah informasi.



formasi, berpikir kritis, dan mengolah emosi di tengah arus media sosial. Pendidikan literasi digital tidak kalah penting dari pendidikan matematika atau sains.

Mengembalikan Narasi

Kita tidak boleh terjebak dalam retorika guru sebagai beban negara. Kita harus mengembalikan narasi bahwa guru adalah aset bangsa. Ki Hadjar Dewantara mengingatkan, pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, melainkan proses pembentukan karakter. Jika demikian, mengapa kita masih sering menomorduakan kesejahteraan guru?

Polemik ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat komitmen negara terhadap guru: bukan sekadar menaikkan gaji, melainkan memperhatikan kualitas hidup guru secara holistik: dengan memberi kesempatan pengembangan diri, mengakses teknologi dan penghargaan yang layak.

Jalan ke Depan

Polemik ini mengundang kita bere-

deksi:

Pertama, komunikasi publik yang jernih: pemerintah harus segera merilis versi lengkap setiap pidato penting di berbagai kanal resmi, agar publik tidak mudah terkejut pada potongan-potongan. Kedua, pendidikan adalah kunci. Kedua, pendidikan tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada APBN. Dunia usaha, masyarakat sipil, bahkan komunitas keagamaan perlu ikut terlibat melalui dana abadi, beasiswa, maupun pendampingan moral. Ketiga, penguatan literasi digital: guru perlu diberi bekal untuk memanfaatkan literasi digital pada generasi muda. Anak-anak harus diinformasi dan berpikir kritis sebelum percaya.

Dari Beban Menjadi

Harapan

Bung Karno pernah berkata, "Perjuangan kita lebih mudah karena ada guru yang mengajar. Perjuangan akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Kata-kata ini relevan dengan tantangan pendidikan kita. Musuh kita bukan lagi penjajah asing, melainkan ketidakpedulian, kebodohan, dan manipulasi informasi.

Guru berada di garis depan perjuangan ini. Mereka tidak boleh dipandang sebagai beban negara, melainkan sebagai harapan yang menyelamatkan masa depan bangsa. Tugas kita adalah memastikan para guru mendapatkan penghargaan yang layak.

Untuk mencapai Indonesia Emas pada 2045, guru berperan sebagai cahaya bangsa. Tugas kita untuk menjaga agar cahaya itu tidak pernah padam. (*)

*Bernardus Agus Rukiyanto,

Dosen Universitas Sanata Dharma.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan dengan email: opini@kr.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan memberi subjek mengenai isi yang ditulis serta jangan lupa melampirkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

Ketika Angin Tak Lagi Singgah



C Jarot Priyogutomo

DI awal pendiriannya, sebuah organisasi kerap lahir bukan dari kekuatan uang atau struktur, melainkan dari keyakinan. Para pendiri bekerja dengan semata untuk penghidupan, tetapi demi cita-cita.

Saat itu, angin semangat bertiup kencang. Ia masuk ke ruang-ruang rapat yang kecil, menyusup dalam percapakan seru hingga larut malam, dan menyalakan berbagai keraguan sekaligus harapan. Orang bekerja tanpa harus diurus. Visi mengalir begitu saja. Kesulitan menjadi perekat, setiap ada tantangan membuat persatuan bukan pemisah.

Namun angin itu, seperti segala hal hidup, tidak selalu menepat. Perlahan, ia mulai hilang ketika organisasi mulai sibuk membangun gedung, menata prosedur, memperindah laporan. Semuanya rapi, tapi kehilangan getaran. Jiwa yang dulu menyala, kini meredup di balik angka dan target.

Banyak organisasi berjalan seperti tubuh tanpa roh. Mekanisme tetap hidup. Proyek terus digulirkan. Tapi ada kehampaan yang sulit dijelaskan. Tidak ada gairah, tidak ada arah. Hanya rutinitas yang dipeliharai. Orang-orang hadir, tapi tak betul-betul terlibat. Mereka patuh, tapi tak tergerak.

Garth Morgan, dalam karya klasiknya *Images of Organization* (2006), menulis bahwa organisasi bukan hanya struktur formal, tetapi juga "entitas hidup yang memiliki kepribadian, nilai, dan semangat kolektif yang membentuk identitas dan arah." Bila unsur hidup ini menghilang, organisasi tetap bisa berjalan namun kehilangan maknanya.

Kondisi ini terlihat nyata di banyak tempat. Ada koperasi rakyat yang dulunya menjadi pusat solidaritas, kini

terjadi konflik internal dan utang yang tak masuk akal. Ada organisasi keagamaan yang dulunya penuh semangat melayani, kini sibuk menjaga kuasa. Bahkan lembaga pendidikan pun kadang lebih khawatir tentang akreditasi dibanding pertumbuhan batin peserta didik.

Ironisnya, justru ketika organisasi menjadi besar dan mapan, ia mulai mengganti kepercayaan dengan aturan, mengganti semangat dengan prosedur. Profesionalisme yang tumbuh, sering kali justru steri dari rasa. Yang tersisa adalah orang-orang yang sibuk bekerja, tapi tak tahu lagi untuk apa. Di sinilah krisis bermula: saat pekerjaan kehilangan makna, dan keberhasilan hanya diukur dari grafik.

Selain itu, tekanan persaingan dan kebutuhan akan efisiensi mendorong organisasi semakin mekanis. Banyak keputusan dibuat berdasarkan data dan angka semata tanpa menyentuh hati nurani kolektif. Akibatnya, komunikasi menjadi kaku, hubungan antaranggota dingin, dan inovasi meredup. Rasa memiliki yang dulu mengut, kini digantikan oleh budaya "kerja demi memenuhi aturan."

Identitas organisasi, seperti dicatat Ravasi dan Schultz dalam *Academy of Management Journal* (2006), bisa perlahan membusuk jika nilai-nilai awal tidak ditransmisikan secara efektif antar generasi. Organisasi pun berjalan seperti kerangka yang dipaksa tetap tegak, padahal isi batinnya telah menguap.

Apakah ini bisa dicegah? Bisa. Tapi tidak dengan pelatihan motivasi kilat atau jargon perubahan. Jiwa organisasi hanya bisa dijaga bila para pemimpinnya sadar bahwa dengan mereka rawat bukan sekadar sistem, tapi roh kolektif. Ini memerlukan keberanian untuk mendengar kembali

suara awal pendiriannya yang sering tertutup oleh keberhasilan administratif.

Pemimpin sejati harus mampu menjaga keseimbangan antara struktur dan spirit. Ia bukan hanya manajer yang menjaga arus kas atau target produksi, tetapi juga penjaga api yang menerangi jalan saat gelap. Dengan memberi ruang bagi kreativitas, empati, dan dialog terbuka, organisasi bisa tetap bernapas dan tumbuh dari dalam.

Mungkin kita perlu bertanya ulang: apa yang dulu membuat organisasi ini berdirir? Apakah kita masih setia pada panggilan itu? Bila jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sederhana ini tak lagi membangkitkan semangat siapa pun, maka ada yang perlu diperiksa.

Karena organisasi bisa saja terus hidup secara administratif. Tapi bila angin tak lagi singgah, bila napasnya hilang, maka ia hanyalah tubuh kosong yang perlahan mengering. (*)

*Drs C Jarot Priyogutomo MBA

Dosen Pemasaran Fakultas Bisnis dan

Ekonomika Universitas Atma Jaya

Yogyakarta

Pojok KR

Wamenaker Immanuel Ebenezer terkena OTT KPK terkait sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja.

- Ini juga keceklakaan?

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak akan lobi penurunan dana.

- Terserah Pusat.

Puan Maharani menyatakan tunjangan rumah anggota DPR RI Rp 50 juta sudah dikaji.

- Juga sudah diuji?

Berita

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta.

Terbis Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984)

Penerus: Dr H Soemardi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Komisaris Utama: Imam Satriyadi, SH.

Komisaris: Mohammad Wirman Samawi, SE, MIB.

Direktur Utama: Drs. H. Mohammad Itham Samawi.

Direktur Keuangan: Yurita Nugroho Samawi, SE, MM, MSc.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.

Direktur Produksi: Bachro Jati Prabowo SSoS.

Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoke Indra Agung Laksono, SE.

Direktur Umum: Ir. Dyah Sarjuningrum Situwati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Itham Samawi, Pemimpin

Redaksi/Pengantar: Drs. H. Octo Lampiris MEd, Wakil Pemimpin

Redaksi: Drs. H. Ahmad Luthfie MA, Dr. Ronny Sugantoro, MM, CHE, Redaktur

Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Musabada, Drs. Widy

Suprayono, Drs. H. Swanto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN, Hassan, Drs. Jayadi K

Kastari, Subhan Mustafa, Drs. Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Retno

Wulandari SSoS, H. M. Sohrin, Lenggur Sumukti, Latief Noer Rochmana, Fotografer:

Effy Widjono Putro, Surya Adi Lestmana. Grafis: Joko Santoso SSoS, Basu Wijan

nariko. Sekretaris Redaksi: Drs. Ari Supriyanto.

Kepala TU: Langgana: Drs. H. Samawi, Telp (0274)-565685 (Hunting)

Manajer: Itham Agung Sudjo, Telp (0274)-565685 (Hunting) Fax: (0274) 555690.

E-mail: idelfor@kr.com, idelfor@kr.com, idelfor@kr.com, idelfor@kr.com.

Langganan per bulan termasuk "Kedaulatan Rakyat Minggi": Rp 90.000,00, Iklan

Umum/Display: Rp 27.500,00/mm km, Iklan Keluaran: Rp 12.000,00/mm km, Iklan

Basis/Cikl (min. 3 basis, maks. 10 basis): Rp 12.000,00/basis, Iklan Satu Kolom (min.

30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm km, Iklan Khusus: Ukurung 1 km x 45 mm

- Rp 210.000,00, (Wideside 100 studi D1 w/d S1, Permukiman, Ujung Tahun) Iklan

Warna: Full Colour Rp 61.000,00/mm km (min. 600 mm km), Iklan Kuping (2 km x

40 mm) 500% dari tarif Iklan Halaman 1: 300 % dari tarif (min. 2 km x 30 mm, maks.

2 km x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum

termasuk PPN 10%.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis,

Yogyakarta, 55232. Fax: (0274)-565125, Telp: (0274)-565685 (Hunting).

Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573,

Telp: (0274)-496549 dan (0274)-496449. Is di luar tanggungjawab percetakan.

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail:

nasohkr@gmail.com. Radio: KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank Mandiri. Reki: 1370025381365, Bank BNI. Reki: 003.0440.854 Cabang

Yogyakarta.

Pewakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax

(021) 8500529.

Wartawan: H. Ishaq Zubaidi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini

Suryati, Ida Lumaraga Ritonga.

Semarang: Jalan Lampiris No. 62, Semarang, Telp (024) 8316792. Kepala Per-

wakilan: Budiono Juman, Wakil: Idrisyo Juman SIP.

Banyuwangi: Jalan Prof Moh Yamin No. 15, RT 7 RW 03 Karanglemes,

Purwokerto Selatan, Telp (0281) 822244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SEd,

Wakil: Dryanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogutungan Klaten, Telp (0272)

322756. Kepala Perwakilan: Sri Wastu.

Kulonprogo: Jalan Veteran No. 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala

Perwakilan: Muchlisah, Wakil: Asrul Sani.

Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 933562.

Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wurng Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -

- Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.